

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Income Per Kapita**

Pendapatan per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.<sup>1</sup> Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.<sup>2</sup>

Definisi pendapatan perkapita daerah atau pendapatan perkapita desa pada penelitian ini tidak dapat lepas dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk di wilayah tersebut menghasilkan pendapatan per kapita.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rovia Nugrahani Pramesthi *Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal, hlm, 2.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>3</sup>Stefandy Dengah, Vecky Rumatte dan Audie Niode, *Analisis Pengaruh Pendapatan Per kapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012*, Jurnal, hlm. 75.

Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan harga konstan dengan tujuan berbeda. Pertumbuhan pendapatan perkapita yang positif dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian daerah.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama dekade 10 tahun terakhir (periode 2002-2013) mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur hanya mencapai kisaran 3-5 persen dari tahun 2002-2013. Kenaikan terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,19 persen, pertumbuhan ekonomi ini adalah yang tertinggi sejak krisis.<sup>4</sup> Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian. Meskipun pertumbuhan ekonomi dinyatakan tinggi namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi di Provinsi Jawa Timur, salah satunya yaitu pembangunan. Dimana keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut tercermin dalam penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2014.

Dalam suatu daerah, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata hanya diukur dari kemampuannya untuk meningkatkan produk domestik bruto serta pendapatan per kapita dari penduduknya. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari keberhasilan usaha daerah untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut suatu daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif menurut Samsura (dalam Rengu) dianggap sebagai strategi pembangunan dan penentuan keputusan publik, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam pembangunan..

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan masyarakat yang terwujud dalam perencanaan partisipatif, dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik, memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri dan menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.<sup>5</sup>

Distribusi pendapatan yang merata antar penduduk/ rumah tangga mengandung dua segi penting, yaitu:

1. Meningkatkan tingkat hidup mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

---

<sup>5</sup>Muhammad Faisal Asariansyah, Choirul Saleh, Stefanus Pani Rengu, *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Lawang Provinsi Malang)*, Jurnal, hlm. 5.

2. Pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit tingkat pendapatan antar rumah tangga.

Selama pertumbuhan ekonomi masih dinikmati secara adil oleh masyarakat, maka persoalan pemerataan ini tidak akan muncul. Persoalan tersebut terjadi jika terjadi perubahan *status quo* dari golongan yang kaya dan golongan miskin, berupa perbedaan tingkat pendapatan yang semakin lebar. Dengan kata lain adanya perbedaan kesempatan untuk mendapatkan *trickle down effect* dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Golongan masyarakat yang mendapat kesempatan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi akan berusaha memperbesar pada posisinya sedangkan masyarakat yang tidak beruntung akan mendapat bagian yang kecil.

Indikator Income Perkapita menurut Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal dan tingkat pendapatan yang tinggi jika warga tersebut menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke tabungan dan investasi. Demikian pula, model Solow memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap pendapatan perkapita. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk.
2. Pendapatan.
3. Investasi.
4. Pendidikan.<sup>6</sup>

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali

---

<sup>6</sup>Putu. Oktavia, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan/kapita*. Jurnal, hlm. 4.

sumber-sumber keuangan local, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>7</sup> Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.<sup>8</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu.<sup>9</sup>

**Tabel 2.1**  
**Distribusi Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan**  
**Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2013 - 2015<sup>10</sup>**

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015
A. Makanan	50,64	49,48	50,54
1. Padi-padian	9,52	9,22	8,76
2. Umbi-umbian	0,31	0,27	0,29
3. Ikan	3,03	2,92	3,06
4. Daging	1,83	1,93	1,83
5. Telur dan Susu	3,00	2,86	3,03
6. Sayuran	4,07	3,54	4,22
7. Kacang-kacangan	2,26	2,21	2,27
8. Buah-buahan	2,00	2,04	2,05
9. Minyak dan Lemak	2,2	2,19	2,03
10. Bahan Minuman	2,3	2,15	2,17
11. Bumbu-bumbuan	1,26	1,17	1,16
12. Konsumsi Lainnya	1,15	1,12	1,05
13. Makanan dan Minuman Jadi	12,63	12,22	12,74
14. Tembakau dan Sirih	5,08	5,63	5,87

<sup>7</sup>Adi, Priyo Hari, dan Harianto, David. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*, hlm. 56.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>10</sup>BPS Provinsi Jawa Timur Susenas 2013 – 2015.

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015
B. Bukan Makanan	49,36	50,52	49,46
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air	19,25	18,48	18,37
2. Aneka Barang dan Jasa	18,2	18,64	18,86
3. Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	3,2	2,83	3,03
4. Barang Tahan Lama	5,52	6,91	6,02
5. Pajak Pemakaian, Premi Asuransi	1,75	1,83	1,74
6. Keperluan Pesta dan Upacara	1,43	1,83	1,45
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Susenas 2015

## B. Upah Minimum Regional

### 1. Pengertian Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah pemahaman terhadap penetapan Upah Minimum Regional yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan adalah untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan ketetapan upah minimum kepada buruh yang paling rendah tingkatnya. Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau kebijaksanaan untuk menjamin kebutuhan hidup paling minimum karyawan beserta keluarganya, juga sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar upah pekerja/ karyawan tidak terus turun semakin rendah sebagai akibat seimbangannya pasar kerja.<sup>11</sup>

Kebijakan Upah Minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut. Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan Upah

<sup>11</sup>Suryahadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung; PT Refka Aditama, 2010), hlm. 73.

Minimum pada akhir tahun 1980an. Hal ini terutama disebabkan adanya tekanan dari dunia internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Di masa tersebut, sebuah organisasi perdagangan Amerika Serikat (AFL-CIO) dan beberapa aktivis hak asasi manusia mengajukan keberatan terhadap sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat beroperasi di Indonesia yang diduga memberikan upah yang sangat rendah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang berada di bawah standar.<sup>12</sup>

Dewan Pengupahan telah melakukan survey komponen KHL kebutuhan hidup seorang pekerja lajang untuk kebutuhan satu bulan di Jakarta dari Februari hingga September 2011. Berikut hasil survey KHL yang nantinya jadi tolak ukur penetapan UMP Jawa Timur 2012. Upah dan pendapatan yang layak merupakan satu parameter seseorang dapat hidup sejahtera. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sistem pengupahan “upah minimum”. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lepas dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap 46 komponen kebutuhan pekerja lajang yang terdiri dari 7 komponen utama KHL yaitu: makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi & tabungan.<sup>13</sup>

## **2. Indikator Penetapan Upah Minimum Regional**

Besar-kecilnya upah di suatu daerah, tidak bisa dilihat dan diukur hanya dari satu atau beberapa aspek saja. Dengan perkataan lain, besar-

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>13</sup>Dewan Pengupahan Jawa Timur, 2012.

kecilnya upah daerah sangat ditentukan oleh banyak indikator, antara lain misalnya:<sup>14</sup>

- a. Tinggi-rendahnya produktivitas
- b. Beban kerja serta besar-kecilnya resiko pekerjaan
- c. Aspek kewilayahan, seperti jauh-dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah;
- d. Banyak atau sedikitnya *uji kompetensi* dan *sertifikasi kompetensi* yang dimiliki, atau tinggi-rendahnya kualifikasi pendidikan (sebagai *basic start* awal dalam bekerja).

Sebagai hasilnya, kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan upah minimumnya dengan menaikkan upah minimum sampai dengan tiga kali lipat dalam nilai nominalnya (dua kali lipat dalam nilai riil). Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau instrument kebijaksanaan sesuai untuk mencapai kepantasan dalam hubungan kerja. Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah untuk:<sup>15</sup>

- a. Mengurangi persaingan yang tidak sehat antara buruh dalam pasar kerja disebabkan karena tidak sempurnanya pasar kerja.
- b. Melindungi daya beli buruh yang berpenghasilan rendah karena tingkat inflasi yang tinggi menurunkan daya beli buruh.
- c. Mengurangi kemiskinan, karena adanya kenaikan upah minimum setahap demi setahap kaum buruh yang miskin akan berkurang.

---

<sup>14</sup>Ahmad Tohardi, *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, 2002), hlm. 246.

<sup>15</sup>Shamad Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 63.

- d. Meningkatkan produktivitas kerja, karena dengan adanya upah minimum maka pengusaha yang membayar upah rendah akan didorong menaikkan upah buruhnya.
- e. Lebih menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama, dengan adanya upah minimum maka perbedaan upah antara perusahaan yang satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang sama akan berkurang karena perusahaan membayar rendah terpaksa meningkatkan upah buruhnya.
- f. Mencegah terjadinya perselisihan, dengan ketentuan upah minimum akan mempengaruhi perubahan struktur/ tingkat upah di perusahaan, karena itu perselisihan mengenai upah yang biasa terjadi dapat dihindari, karena meningkatnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
- g. Mencegah melorotnya upah kebawah bagi buruh lapisan bawah karena tidak seimbang pada pasar kerja, disebabkan penawaran yang melebihi dari permintaan tenaga buruh.

Dalam menetapkan dan menerapkan Upah Minimum Regional tersebut, negara berkembang termasuk Indonesia pada umumnya menghadapi dua masalah yaitu; terdapat kesenjangan pendapatan yang sangat menyolok baik antara buruh bawahan dengan pimpinan di satu perusahaan, maupun antara buruh di sektor berbeda (misalnya buruh harian lepas di perusahaan tekstil dengan buruh serupa di bank atau tambang), serta antar daerah yang berbeda, terutama bila terdapat

surplus penyediaan dalam pasar kerja, sehingga dengan demikian sulit menyeragamkan ketentuan upah minimum. Juga pendapatan per kapita di negara berkembang cukup rendah serta tingkat pengangguran dan setengah pengangguran cukup tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja sering menjadi prioritas utama di atas perbaikan upah.

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Penerimaan Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2010 – 2015**

Uraian	2010	2011	2012	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga	229.341.156	240.833.142	258.085.464	273.947.021	294.177.192
Makanan	127.441.916	133.878.694	142.468.637	149.298.363	157.641.916
Non Makanan	101.899.240	106.954.447	115.616.827	124.648.657	136.535.276
Konsumsi Lembaga Swasta	2.052.009	2.227.210	2.400.753	2.538.554	2.643.846
Konsumsi Pemerintah	23.398.129	26.045.137	26.164.220	26.226.155	26.821.595
Pembentukan Modal	57.559.552	61.661.346	67.624.453	71.267.192	76.018.807
Perubahan Stok	4.222.949	8.517.665	3.722.044	6.708.117	3.906.601
Ekspor	148.485.703	161.998.110	180.000.763	200.789.958	213.783.606
Antar Negara (Luar Negeri)	74.110.265	80.370.866	89.865.243	93.038.530	96.243.905
Antar Propinsi	74.375.437	81.627.244	90.135.520	107.751.428	117.539.700
Impor	144.198.332	159.001.848	171.014.422	187.814.152	197.923.203
Antar Negara (Luar Negeri)	67.029.683	75.273.381	82.324.170	92.711.146	94.924.233
Antar Propinsi	77.168.648	83.728.467	88.690.252	95.103.005	102.998.970
Produk Domestik Regional Bruto	320.861.168	342.280.764	366.983.277	393.662.847	419.428.445

Sumber: [www.bps.jatim.go.id](http://www.bps.jatim.go.id)<sup>16</sup>

Dari tabel di atas, diketahui Penerimaan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah 84.779, hal ini dipengaruhi dengan peningkatan

<sup>16</sup>Badan Pengelola Keuangan dan Asset Jawa Timur 2015.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 sebesar 77.799 meningkat sebesar 9.77 % dari tahun sebelumnya. Hal ini memberikan pengaruh pada kebijakan pemberian Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 yang ditetapkan pada 1 November 2016 sebesar Rp 1.283.000 per bulan.

Pada awalnya kebijakan upah minimum ditetapkan berdasarkan biaya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) pada tahun 1985. Dalam perkembangannya kemudian, dalam era otonomi daerah, dalam menentukan besaran tingkat upah minimum beberapa pertimbangannya adalah:

a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)

Dalam usulan penetapan upah minimum, nilai KHM merupakan salah satu pertimbangan utama. Setiap pengusulan harus menggambarkan adanya penambahan pendapatan buruh secara riil bukan kenaikan nominal. Penetapan KHM diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.81/Men/1995.

b. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Pada prinsipnya perkembangan IHK mempengaruhi perkembangan KHM, sebab komponen-komponen yang tercantum dalam KHM sudah termasuk dalam komponen IHK dan harus selalu dibandingkan dengan perkembangan IHK.

c. Perluasan kesempatan kerja.

Kebijaksanaan penetapan upah minimum diharapkan dapat memberikan tingkatan upah yang layak dan wajar, sehingga akan

mendorong produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan perluasan/ perkembangan usaha (*multiplier effect*), yang berarti memperluas kesempatan kerja.

d. Tingkat upah minimum antar daerah.

Untuk hal ini setiap daerah perlu mengadakan komunikasi dengan daerah lain yang berdekatan atau perbatasan untuk memperoleh informasi tingkat upah terendah yang berlaku di daerah tersebut.

e. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan.

Dalam upaya penetapan usulan upah minimum, perlu mempertimbangkan kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan. Hal ini agar upah yang terlaksana tanpa menimbulkan gejolak dalam pelaksanaannya.

f. Tingkat perkembangan perekonomian

Untuk penetapan besaran upah minimum yang baru, nilai tambah yang dihasilkan oleh buruh dapat dilihat dari adanya perkembangan PDRB dalam tahun yang bersangkutan.

Peningkatan upah perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan bekerja dari buruh dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan upah minimum adalah perkembangan harga pasar serta kinerja perusahaan. Penyesuaian terhadap upah tersebut harus dilakukan setidak-tidaknya setiap tahun.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Upah Mahal Regional se Jawa Timur tahun 2017<sup>17</sup>**

1 KOTA SURABAYA	Rp.	3.296.212,50
2 KAB. GRESIK	Rp.	3.293.506,25
3 KAB. SIDOARJO	Rp.	3.290.800,00
4 KAB. PASURUAN	Rp.	3.288.093,75
5 KAB. MOJOKERTO	Rp.	3.279.975,00
6 KAB. MALANG	Rp.	2.368.510,00
7 KOTA MALANG	Rp.	2.272.167,50
8 KOTA BATU	Rp.	2.193.145,00
9 KAB. JOMBANG	Rp.	2.082.730,00
10 KAB. TUBAN	Rp.	1.901.952,50
11 KOTA PASURUAN	Rp.	1.901.952,50
12 KAB. PROBOLINGGO	Rp.	1.879.220,00
13 KAB. JEMBER	Rp.	1.763.392,50
14 KOTA MOJOKERTO	Rp.	1.735.247,50
15 KOTA PROBOLINGGO	Rp.	1.735.247,50
16 KAB. BANYUWANGI	Rp.	1.730.917,50
17 KAB. LAMONGAN	Rp.	1.702.772,50
18 KOTA KEDIRI	Rp.	1.617.255,00
19 KAB. BOJONEGORO	Rp.	1.582.615,00
20 KAB. KEDIRI	Rp.	1.576.120,00
21 KAB. LUMAJANG	Rp.	1.555.552,50

### 3. Penetapan Upah dalam Perspektif Islam

Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia, sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonomi Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional.

Bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakana secara eksplisit. Selain itu dalam bukunya secara implisit juga dijelaskan bahwa, harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan,

---

<sup>17</sup>Peraturan Gubernur Jawa Timur No 123 tahun 2016 tanggal 18 November 2016.

Abu Yusuf mengidikasikan adanya variable-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di Negara itu, penimbunan ataupun menahan suatu barang, atau lainnya.<sup>18</sup>

Pada dasarnya faktor faktor yang mempengaruhi penentuan upah sebagai berikut:

a. Harga barang

Pada umumnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula sebaliknya.

b. Efek Substitusi

Efek substitusi berarti bahwa harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang biar menggantikan fungsi dari barang yang harga naik tersebut (barang substitusi).

c. Efek Pendapatan

Efek pendapatan berarti bahwa, jika harga suatu barang naik maka berarti pula secara riil pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama hanya dapat membeli barang sedikit.

d. Pendapatan Konsumen

Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka akan semakin tinggi daya belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan semakin meningkat pula.

---

<sup>18</sup>Abu Yusuf ibn Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitabal-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1979) atau lihat Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hlm. 15.

e. Harapan

Meskipun tidak secara eksplisit, pemikiran ekonomi Islam klasik telah menengarai peran ekspektasi dalam menentukan permintaan. Ekspektasi bisa berupa ekspektasi positif maupun negative. Dalam kasus ekspektasi positif akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang, dan untuk ekspektasi negative.

f. Mashlahah

Pengaruh masalah terhadap upah tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebab ini tergantung kepada tingkat keimanan. Jika masalah relative turun maka jumlah upah akan turun juga, begitu juga sebaliknya.

## C. Human Development Indeks

### 1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari salah satu organisasi pengembangan manusia, sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>UNDP (*United Nations Development Programme*), 1995.

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga

pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak hanya berhenti sampai di sana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani.

Selain itu, pengertian pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk agar mencapai hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Indeks* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 oleh pemenang nobel India, Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Merghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai “pengukuran vulgar” oleh Amartya Sen karena batasannya, indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna bagi jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur

berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada

pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>ML. Jhingnan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan D.Guritno, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 93.

a. Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna. Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- 2) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- 3) *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

- 1) Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*life expectancy rate*), parameter kesehatan

---

<sup>21</sup>UNDP, *Human Development Report*, 1993, hlm. 105-106.

dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.

- 2) Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
- 3) Pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:<sup>22</sup>

- 1) *Kecukupan*, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- 2) *Jati Diri*, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).

---

<sup>22</sup>Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga*, terjemahan Mursid, (Jakarta: Balai Aksara, 2006), hlm. 269.

3) *Kebebasan dari Sikap Menghamba*, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

b. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.

**Tabel 2.4**  
**Pengukuran Pembangunan Manusia**

Indikator	Komponen	Kondisi	
		Ideal	Terburuk
Kelangsungan hidup	Angka Harapan Hidup (thn)	85,5	25,0
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (%)	100,0	0,0
	Rata-rata lama sekolah (thn)	15	0
Daya Beli	Konsumsi rill perkapita (Rp)	732.720	300.000

Sumber: UNDP<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Mudrajat Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Cet. ke-V. (Jakarta: Binarupa Aksara, 2014), hlm. 63.

Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap data 160 negara pada tahun 1990, ranking HDI semua negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.
- 2) Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79.
- 3) Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Dapat disimpulkan bahwa negara dengan nilai HDI dibawah 0,51 hingga 0,79 dapat dikatakan bahwa negara tersebut mulai memperhatikan pembangunan manusianya, sedangkan negara dengan nilai HDI 0,8 berarti negara tersebut sangat memperhatikan pembangunan manusianya.<sup>24</sup>

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- 1) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- 2) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

- 3) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- 4) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini:

- 1) Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup.
- 2) Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi.
- 3) Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Tinggi: IPM lebih dari 80,0
- b. Menengah Atas: IPM antara 66,0-79,9
- c. Menengah Bawah: IPM antara 50,0-65,9
- d. Rendah: IPM kurang dari 50,0.

Badan PBB Urusan Pembangunan UNDP mengatakan indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Ini terlihat dari angka harapan hidup dan pendapatan nasional bruto per kapita di

Indonesia. Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen.<sup>25</sup>

## 2. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Dari hasil kajian al-Qur'an dan as-Sunnah, maka pokok-pokok kebutuhan manusia dapat diketahui dengan pasti misalnya: pangan, air, pakaian, tempat tinggal, biologis, pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, kenyamanan, hiburan, status sosial dan loyalitas. Imam al-Ghozali dan Imam Izzuddin bin Abd Salam berpendapat bahwa yang paling tepat dan mampu menerangkan kebutuhan manusia ialah sang Pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Ta'ala. Dan walaupun kebutuhan manusia dibatasi didalam nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak berarti segalanya akan tetap (*fixed*). Karena secara hakikat dan kenyataannya kebutuhan manusia itu mengalami perubahan bentuk, nilai, varian dan lain sebagainya sesuai zaman masing-masing. Sehingga terdapat keragaman dalam berbagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia sesuai zamannya masing-masing. Prinsip kebutuhan tersebut

---

<sup>25</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/undp-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-alami-kemajuan/3110936.html> diakses tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.07

akan tetap bersifat objektif rasional. Dan disitulah pentingnya peranan ijtihad, sehingga Islam akan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan manusia disegala zaman.

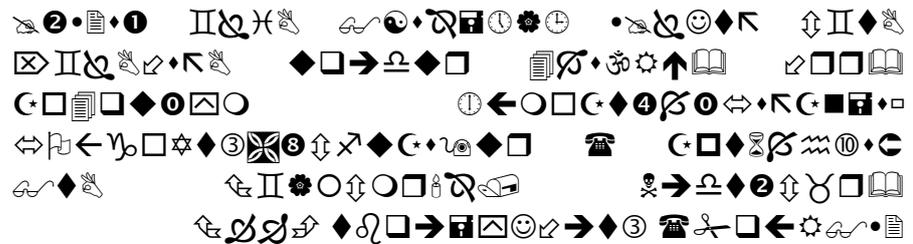
Islam menerapkan ketentuan dan pedoman dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia kedalam 3 bentuk tingkatan: Pertama; tingkat pemenuhan kebutuhan primer yang merupakan batas minimal untuk kelangsungan hidup manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, jika kebutuhan primer ini tidak dipenuhi maka manusia sulit menemukan fitrahnya dalam menjalankan tugas kehidupan didunia. Kedua; tingkat kebutuhan sekunder. Jika manusia dapat memenuhi kebutuhan sekunder ini maka kelancaran tugas dan tujuan hidupnya relatif akan terjamin. Ketiga; tingkatan kebutuhan yang beraneka ragam, bentuk, macam dan kuantitasnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Yakni tingkatan yang sifatnya hanya melengkapi, menghiasi dan menghibur.

Sebagian ulama' Islam berpendapat bahwa selain 3 tingkatan diatas maka kebutuhan hanyalah berupa kehancuran, kerusakan dan kesia-siaan. Pedoman Islam dalam hal ini ialah pemenuhan kebutuhan yang bersifat pembangunan, pengembangan dan pensucian diri. Dan jika telah mencapai syarat pembangunan, pengembangan dan pensucian diri maka ia disamakan dengan tahapan mencapai kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

Namun, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

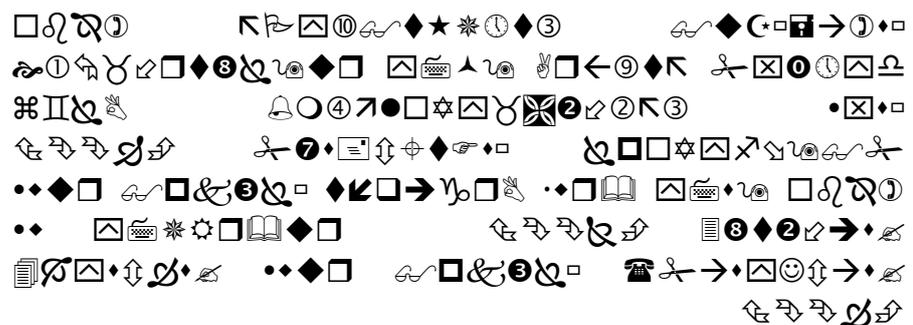
1. Qs. Al-Nahl: 97



Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

2. Qs. Thaha: 117-119



Artinya :

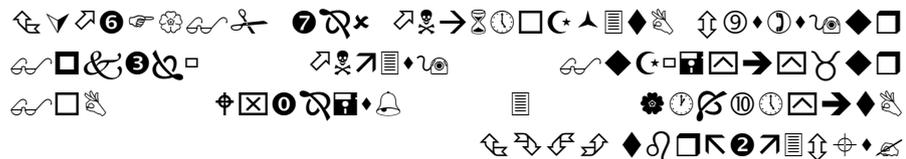
117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

119. dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Kesejahteraan menurut pengertian Al Qur'an tercermin diSurga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.

### 3. Qs. Al-A'raf: 10

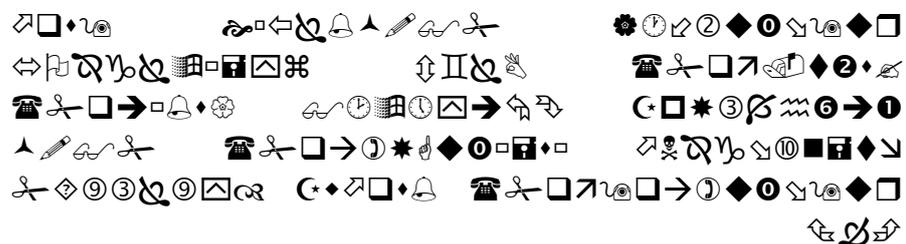


Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hambaNya

untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Nya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkankesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambanganya.

4. Qs. AN-Nisa': 9

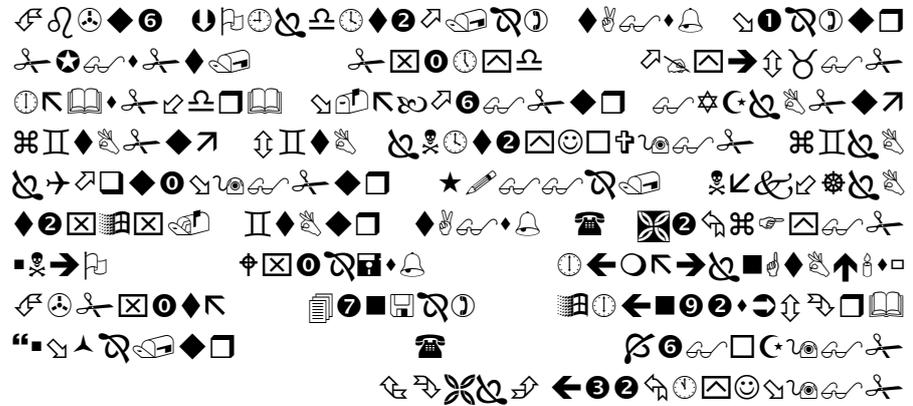


Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah SWT meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah SWT . bahkan Nabi Muhammad SAW juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahliwarisnya.Nabi SAW bersabda:

”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta- minta kepada oranglain.”

5. Qs. Al-Baqarah: 126



Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali”.

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.

**D. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.5  
Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Vecky Rimate, 2013	Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan kota Manado Tahun 2003-2012	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan perumahan. Sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan perumahan
2	Fidelia Usmarlini Dewi, 2012	Analisis Pembangunan Manusia ( <i>Human Development</i> ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2011	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah sekolah dan upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah. Sedangkan variabel jumlah rumah sakit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah.
3	Mu'min Mubarak, 2012	Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di	Kuantitatif	Kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan secara simultan pendapatan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Indonesia		perkapita(X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh nyata dan positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak
4	Rini Sulistiyowati, 2012	Pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia	Kuantitatif	Kenaikan Upah Minimum tidak disebabkan oleh kenaikan kesejahteraan Masyarakat.
5	Ratri Heningtyas Utami	Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional, pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB per Kapita Kabupaten Demak	Kuantitatif	UMR dan PAD berpengaruh positif terhadap PDRB Per Kapita sedangkan tenaga kerja berpengaruh negative terhadap PDRB Per Kapita

Selanjutnya peneliti memberikan uraian mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian pertama dimana fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado, tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan perumahan di Kota Manado dimana variabel yang dimunculkan guna mempengaruhi permintaan

perumahan adalah pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan perumahan. Sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan perumahan.<sup>26</sup>

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah pada penelitian ini terdapat pada menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independen, maka pengelolaan data dilakukan dengan metode analisis dengan model *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai estimasi parameter dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis hasil penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan *SPSS 21.0*. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendapatan perkapita selama 1 dasawarsa mengacu pada stabilitas perkapita yang berpengaruh pada permintaan perumahan di Kota Manado.

Penelitian berikutnya yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fidelia Usmarlini Dewi. Penelitian guna melakukan Analisis Pembangunan Manusia (*Human Development*) Provinsi Jawa Tengah.<sup>27</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah ketersediaan layanan kesehatan, jumlah sekolah dan pengaruh tingkat upah minimum regional terhadap pembangunan manusia di

---

<sup>26</sup>Vecky Rimate dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012. Jurnal ekonomi tahun 2014.

<sup>27</sup>Fidelia Usmarlini Dewi, dengan judul Analisis Pembangunan Manusia (*Human Development*) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011, Skripsi tahun 2012.

Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah sekolah dan upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah. Sedangkan variabel jumlah rumah sakit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah *Human Development Index* dalam penelitian ini digunakan sebagai obyek atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu income perkapita dan UMR Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagaimana tujuan penelitian yang digunakan adalah untuk mengetahui pengaruh income perkapita dan UMR Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terhadap *Human Development Index* atau indeks perkembangan manusia di Provinsi Jawa Timur beserta faktor lain yang mempengaruhinya.

Penelitian relevan yang terakhir yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mu'min Mubarak. Penelitian ini mengetahui Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Jumlah

pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia selama 9 tahun terakhir yaitu periode 2004-2012 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pendapatan perkapita (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) dan satu variabel terikat yaitu penerimaan pajak (Y). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini Kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan secara simultan pendapatan perkapita (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh nyata dan positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak.<sup>28</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel penelitian dimana income perkapita menjadi variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, selanjutnya penggunaan data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada dokumentasi yang didapat oleh peneliti sebelumnya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik terhadap indeks perkembangan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan Susi Sulistiawawati dengan judul Pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa tidak ada pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Letak perbedaan dengan penelitian yang diambil adalah variabel

---

<sup>28</sup>Mu'min Mubarak dengan judul Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. Skripsi tahun 2012.

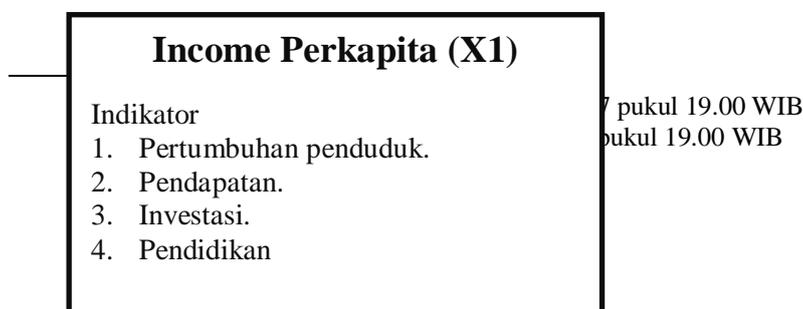
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen sedangkan dalam penelitian menggunakan 1 variabel dependen.<sup>29</sup>

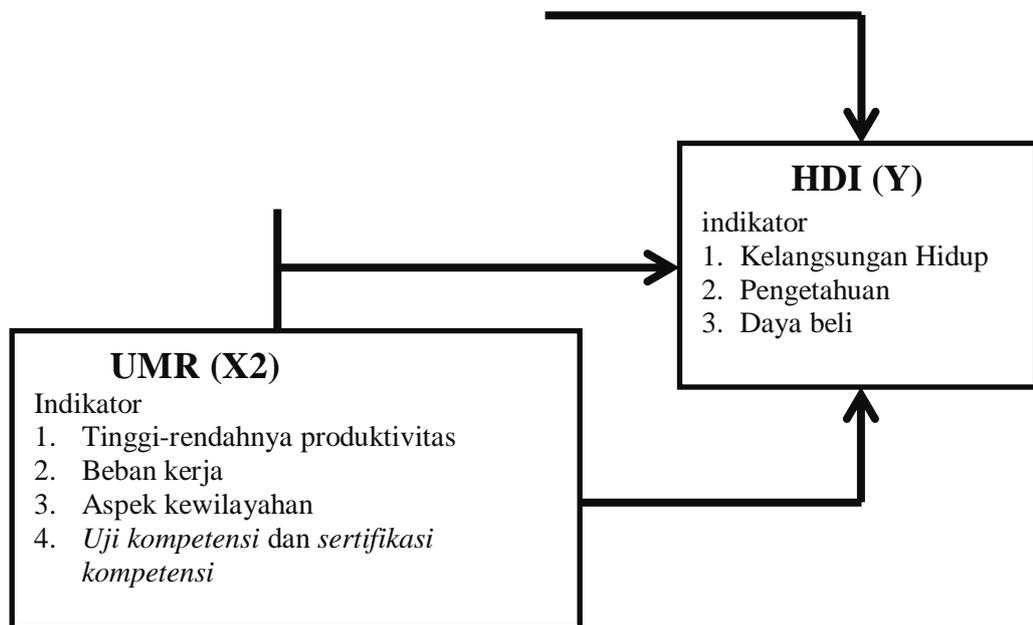
Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Heningtyas Utami tahun 2013 dengan judul Pengaruh tenaga kerja, Upah Minimum Regional dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Per Kapita di kabupatenm Demak tahun 2013 menyatakan bahwa UMR dan PAD berpengaruh positif terhadap PDRB Per Kapita sedangkan tenaga kerja berpengaruh negative terhadap PDRB Per Kapita. Hal tersebut terdapat perbedaan variable independen yang digunakan yakni terdapat tambahan variabel tenaga kerja.<sup>30</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sesuatu yang abstrak, logikal serta arti harfiah dan akan membantu penelitian dan menghubungkan hasil penemuan dengan *body of knowledge*. Dalam penelitian ini kerangka berfikir dikerucutkan dengan mengetahui pengaruh pelaksanaan pembangunan manusia dan pengembangan manusia di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan faktor yang mempengaruhi. Untuk mengetahui kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**  
**Pengaruh Income Perkapita dan Upah minimum Regional terhadap Human Development Index Provinsi Jawa Timur 2016**





Keterangan:

X1 : Income Perkapita<sup>31</sup>

X2 : UMR<sup>32</sup>

Y : HDI<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini income perkapita memiliki pengaruh tersendiri terhadap penetapan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kesejahteraan masyarakat. Hal berikutnya dengan UMR yang memadai akan memberikan kemudahan dalam melakukan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Secara simultan income perkapita dan UMR memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur.

## F. Hipotesis Penelitian

<sup>31</sup>Rovia Nugrahani Pramesthi *Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal, hlm. 2.

<sup>32</sup>Suryahadi, *Manajemen Sumber ...*, hlm. 73.

<sup>33</sup>UNDP (*United Nations Development Programme*), 1995.

1. Terdapat Pengaruh income perkapita terhadap Human Development Index antar kabupaten diJawa Timur tahun 2015.
2. Terdapat pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Human Development Index antar kabupaten diJawa Timur tahun 2015.
3. Terdapat perbedaan income perkapita dan Upah minimum Regional terhadap Human Development Index antar kabupaten diJawa Timur tahun 2015.